

Peran Kepemimpinan Plt Bupati Bekasi dalam Relokasi Pasar Sentra Grosir Cikarang dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Psikologis Para Pedagang

Ananda Fitri Alifiah¹, Rayyan Fathah Nandilham², Aos Kuswandi³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Indonesia, Indonesia

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Riwayat artikel: Diterima : 19/07/2026 Direvisi : 28/07/2026 Dipublikasikan : 09/08/2026 Kata kunci: <i>Plt Bupati Bekasi; Relokasi Pasar; Sentra Grosir Cikarang (SGC); Kesejahteraan Psikologis; Kebijakan Pemerintah Daerah.</i>	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kepemimpinan transformasional Plt Bupati Bekasi dalam kebijakan relokasi pedagang di kawasan Sentra Grosir Cikarang (SGC) serta dampaknya terhadap kondisi psikologis pedagang. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan sumber data yang berasal dari observasi lapangan, analisis dokumen resmi pemerintah, dan pemberitaan media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kepemimpinan transformasional melalui koordinasi lintas sektor berhasil merelokasi 508 pedagang untuk mengurangi kemacetan kronis, kebijakan ini menimbulkan dampak psikologis signifikan berupa kecemasan kolektif dan kekhawatiran mendalam terkait keamanan aset, risiko pencurian, serta potensi bahaya kebakaran di lokasi baru. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa keberhasilan relokasi tidak hanya ditentukan oleh pemindahan fisik, tetapi sangat bergantung pada penguatan fungsi mediasi untuk memitigasi hambatan perilaku pedagang dan menjamin kepastian keamanan. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi dimensi kesejahteraan psikologis pedagang khususnya manajemen ketakutan terhadap risiko kehilangan aset sebagai variabel penentu efektivitas kebijakan kepemimpinan pemerintah daerah dalam penataan ruang publik.
Penulis Korespondensi: Ananda Fitri Alifiah Email: anandafitrialifiah@gmail.com	

PENDAHULUAN

Pasar merupakan pusat distribusi barang dan pemenuhan kebutuhan ekonomi yang memiliki peran krusial dalam struktur wilayah perkotaan. Di Kabupaten Bekasi, Sentra Grosir Cikarang (SGC) berdiri sebagai pusat perdagangan grosir modern pertama dan terbesar yang lokasinya sangat strategis karena dikelilingi kawasan industri dan pemukiman padat. Namun, pesatnya aktivitas perdagangan ini memicu fenomena "pasar tumpah" yang menggunakan badan jalan utama, seperti Jalan RE Martadinata dan Jalan Kapten Sumantri, sehingga menyebabkan kemacetan kronis dan gangguan fungsi fasilitas publik. Kondisi lalu lintas yang tidak kondusif ini mendorong urgensi langkah strategis pemerintah untuk mengembalikan fungsi jalan melalui kebijakan relokasi demi terciptanya tata ruang kota yang tertib, bersih, dan aman.

Kajian mengenai penataan pasar dan relokasi pedagang telah banyak dilakukan dalam literatur sebelumnya. Penelitian oleh Lumbantobing et al. (2024) menyoroti pentingnya

revitalisasi pasar tradisional melalui perbaikan infrastruktur untuk menciptakan lingkungan yang representatif. Dari sisi regulasi, Saefulah (2024) menekankan bahwa strategi pengelolaan pasar yang terorganisir merupakan instrumen penting bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, peran kepemimpinan dalam birokrasi pemerintahan daerah dinilai sebagai faktor determinan; Elza (2025) menyatakan bahwa kepemimpinan transformasional sangat diperlukan untuk mengawal reformasi kebijakan publik yang kompleks.

Meskipun aspek administratif dan fisik relokasi telah banyak dibahas, tantangan utama sering kali muncul pada dinamika konflik dan manajemen sosial. Amira et al. (2026) menjelaskan bahwa konflik antara pedagang kaki lima dan pemerintah kota sering dipicu oleh perbedaan kepentingan dalam pemanfaatan ruang publik. Penelitian terdahulu oleh Nova-Iza (2026) juga menunjukkan bahwa pasca-relokasi, pedagang sering kali menghadapi dinamika sosial-ekonomi yang menantang terkait adaptasi di lokasi baru. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada dampak ekonomi secara makro atau prosedur teknis birokrasi, tanpa mendalami dimensi psikologis dari sisi perilaku pedagang yang terdampak.

Di sinilah letak research gap yang ingin diisi oleh penelitian ini. Sementara studi sebelumnya fokus pada keberhasilan fisik relokasi dan peningkatan PAD, masih terdapat keterbatasan kajian yang mengeksplorasi bagaimana gaya kepemimpinan daerah mampu memitigasi hambatan psikologis pedagang, seperti kecemasan kolektif terhadap keamanan aset dan risiko kebakaran di lokasi baru. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi dimensi kesejahteraan psikologis pedagang, khususnya manajemen ketakutan terhadap risiko kehilangan aset, sebagai variabel penentu efektivitas kebijakan kepemimpinan transformasional dalam penataan ruang publik di Kabupaten Bekasi.

Urgensi penelitian ini semakin kuat mengingat peran strategis Plt Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, yang menerapkan pendekatan proaktif dan koordinasi lintas sektor (TNI, Polri, dan Satpol PP) dalam merelokasi 508 pedagang SGC. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kepemimpinan tersebut tidak hanya mengedepankan aspek teknis penguraian kemacetan, tetapi juga merespons kekhawatiran psikologis kelompok kepentingan seperti Asosiasi Pedagang Pasar Cikarang (ASPEC). Dengan demikian, posisi penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah baru mengenai pentingnya pendekatan psikologi perilaku dalam implementasi kebijakan pembangunan daerah yang berkelanjutan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam fenomena kepemimpinan transformasional serta dampaknya terhadap kondisi psikologis pedagang dalam kebijakan relokasi. Pendekatan ini dipilih guna mengeksplorasi makna dan pengalaman subjek penelitian secara kontekstual di lapangan. Lokasi penelitian ditetapkan di kawasan Sentra Grosir Cikarang (SGC), Kabupaten Bekasi, yang mencakup area "pasar tumpah" di sepanjang Jalan RE Martadinata dan Jalan Kapten Sumantri, serta lokasi tujuan relokasi di Jalan Tumaritis dan kawasan Pasar Baru Cikarang.

Data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu data primer yang diperoleh langsung melalui observasi partisipatif dan wawancara dengan pihak-pihak terkait di lapangan, serta data sekunder yang dikumpulkan melalui studi dokumentasi resmi pemerintah Kabupaten Bekasi, laporan kebijakan publik, dan pemberitaan media massa yang relevan dengan proses relokasi pasar. Untuk mengumpulkan data tersebut, peneliti menggunakan tiga teknik utama. Pertama, observasi lapangan dilakukan secara intensif di kawasan SGC sejak Januari 2026 untuk memantau aktivitas perdagangan, kondisi lalu lintas, dan interaksi sosial. Kedua, wawancara dan dialog dilakukan melalui pendekatan mediasi serta diskusi kelompok terarah (FGD) bersama pemangku kepentingan, seperti Plt Bupati Bekasi, dinas terkait, dan perwakilan Asosiasi Pedagang Pasar Cikarang (ASPEC). Ketiga, analisis dokumen dilakukan dengan mengkaji landasan hukum, Raperda strategis, dan dokumen perencanaan pembangunan daerah terkait revitalisasi kawasan perkotaan di Bekasi.

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tiga alur kegiatan yang simultan, yaitu reduksi data untuk menyederhanakan informasi mentah mengenai peran kepemimpinan dan kecemasan pedagang, penyajian data untuk menyusun uraian deskriptif mengenai langkah-langkah kepemimpinan transformasional dan dinamika psikologis yang muncul, serta penarikan kesimpulan untuk merumuskan temuan penelitian mengenai efektivitas mediasi dan manajemen konflik dalam kebijakan relokasi. Sebagai langkah terakhir untuk menjamin kredibilitas dan keabsahan hasil penelitian, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan data dari observasi lapangan, keterangan informan (pemerintah dan pedagang), serta bukti dokumen dan berita media. Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa data mengenai kesejahteraan psikologis pedagang yang diperoleh benar-benar valid dan objektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kepemimpinan Transformasional dalam Implementasi Kebijakan Relokasi

Keberhasilan tahap awal relokasi 508 pedagang di Kawasan SGC (Sentra Grosir Cikarang) tidak dapat dilepaskan dari peran sentral kepemimpinan transformasional yang diterapkan oleh Plt Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja. Secara teoretis dan konseptual, gaya kepemimpinan transformasional jauh melampaui batas-batas birokrasi administratif atau sekadar instruksi struktural vertikal. Kepemimpinan ini berakar pada kemampuan seorang pemimpin untuk mengartikulasikan visi perubahan yang kuat, menginspirasi pengikutnya, serta menunjukkan keteladanan dan keterlibatan langsung di lapangan melalui dimensi *idealized influence* dan *inspirational motivation*.

Dalam konteks penataan ruang publik di Kabupaten Bekasi, Plt Bupati tidak hanya duduk di balik meja birokrasi menerima laporan, melainkan turun secara fisik ke titik-titik krusial kemacetan, khususnya di Jalan RE Martadinata dan Jalan Kapten Sumantri. Tindakan turun ke lapangan ini memiliki dampak simbolik dan substantif yang masif, di mana secara simbolik kehadiran pemimpin di tengah-tengah pedagang kaki lima menunjukkan empati serta keseriusan pemerintah daerah dalam mengatasi karut-marut tata kota, sedangkan secara substantif peninjauan langsung tersebut memungkinkan pengambil kebijakan untuk memetakan kondisi riil di lapangan secara akurat tanpa distorsi birokratis.

Dialog terbuka yang dibangun antara Plt Bupati dan para pedagang menjadi instrumen penting dalam mereduksi jarak psikologis antara penguasa dan rakyat, yang mencerminkan dimensi *individualized consideration* di mana pemimpin memperlakukan setiap individu dengan penuh perhatian dan mendengarkan keluhan mereka secara langsung. Melalui dialog tersebut, Plt Bupati mampu menjelaskan esensi dari kebijakan relokasi bukan sebagai bentuk penggusuran sewenang-wenang yang mematikan mata pencaharian, melainkan sebagai langkah strategis untuk mengembalikan fungsi trotoar dan bahu jalan bagi pejalan kaki, mengurangi kemacetan kronis yang telah merugikan perekonomian mikro, serta menciptakan lingkungan berdagang yang lebih bersih, tertib, dan manusiawi dalam jangka panjang.

Namun, kepemimpinan transformasional ini tidak akan berjalan efektif tanpa adanya instrumen pendukung operasional yang solid, sehingga implementasi kebijakan relokasi ini didukung secara penuh oleh koordinasi lintas sektor yang terintegrasi antara Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang berfungsi sebagai tulang punggung penegakan hukum dan ketertiban. Secara kritis, sinkronisasi antarinstansi ini memegang peran ganda sebagai representasi kehadiran negara yang tegas untuk menjamin ketertiban umum serta mengeliminasi praktik-praktik pungutan liar yang selama ini kerap dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Secara sosiologis dan ekonomis, transformasi wajah ruang publik di Kawasan SGC dari yang semula semrawut, kotor, dan macet menjadi kawasan yang terorganisir rapi membawa implikasi positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena ketika kawasan perdagangan tertata dengan baik, akses konsumen menjadi lebih mudah dan aktivitas transaksi ekonomi menjadi lebih bergairah yang pada gilirannya memperluas basis perpajakan daerah serta retribusi pasar yang transparan.

2. Analisis Psikologi Sosial: Konflik Kepentingan dan Kesejahteraan Psikologis

Meskipun secara fisik dan administratif proses relokasi gelombang pertama ini tampak berjalan efektif, tinjauan yang lebih mendalam melalui kacamata psikologi sosial mengungkap adanya dinamika emosional dan konflik kepentingan yang sangat kompleks. Relokasi pedagang tidak pernah sekadar persoalan teknis memindahkan manusia dan barang dari titik A ke titik B. Ini adalah sebuah disrupsi besar terhadap tatanan kehidupan sosial, psikologis, dan ekonomi para pedagang yang telah lama berakar di suatu wilayah.

Munculnya resistensi yang dimotori oleh Asosiasi Pedagang (ASPEC) terhadap kebijakan pemerintah tidak bisa serta-merta dicap sebagai bentuk pembangkangan hukum atau ketidakpatuhan sipil semata. Dari perspektif psikologi sosial, resistensi tersebut merupakan manifestasi nyata dari kecemasan kolektif terhadap ketidakpastian masa depan di lokasi yang baru. Para pedagang berada dalam kondisi kerentanan psikologis yang tinggi akibat beberapa faktor krusial:

- a. Risiko Kehilangan Aset: Kekhawatiran mendalam bahwa tempat usaha yang baru tidak mampu menjamin keselamatan barang-barang dagangan mereka dari potensi pencurian atau pembobolan kios.
- b. Ancaman Keselamatan Jiwa: Adanya trauma atau kekhawatiran terhadap bahaya kebakaran, mengingat instalasi listrik di bangunan atau area relokasi dinilai tidak memenuhi standar keselamatan yang memadai.
- c. Disrupsi Jaringan Sosial dan Ekonomi: Hilangnya pelanggan tetap yang sudah terbangun bertahun-tahun di lokasi lama, serta kekhawatiran bahwa lokasi baru akan sepi pembeli (ketiadaan market pull).

Ketakutan-ketakutan ini membentuk sebuah persepsi risiko yang sangat tinggi di kalangan pedagang, yang pada akhirnya menghambat penerimaan terhadap kebijakan publik. Ketakutan pedagang terhadap relokasi sebagai ancaman eksistensial memiliki dasar empiris yang kuat. Pedagang pasar yang menghadapi kebijakan penataan ulang atau relokasi mengalami berbagai permasalahan pasca-relokasi, meliputi pemasaran, permodalan, sarana prasarana, kurangnya dukungan pemerintah, dan teknologi. Pedagang stasioner yang telah membentuk asosiasi untuk menegosiasikan kepentingan mereka sering kali merasa tidak berdaya ketika menghadapi keputusan penutupan pasar dan relokasi yang diambil di tingkat pemerintah yang lebih tinggi.

Persepsi risiko yang tinggi di kalangan pedagang terhadap kebijakan relokasi merupakan fenomena yang terdokumentasi secara luas dalam berbagai konteks di Indonesia. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang menyebutkan bahwa ketakutan utama pedagang meliputi penurunan penghasilan, kehilangan lapak strategis, dan sepi pembeli di lokasi baru (Rozana et al., 2023; Hidayah & Warsono, 2023; Septian, 2022). Penelitian lain menyebutkan motif perlawanan pedagang muncul karena ketakutan pasar akan sepi serta keinginan mempertahankan lapak yang luas (Rozana et al., 2023).

Relokasi memang dipandang sebagai ancaman eksistensial bagi stabilitas ekonomi pedagang (Septian et al., 2024). Penolakan ini seringkali berujung pada konflik antara pedagang dan pemerintah (Fitlayeni et al., 2021; Fitriana et al., 2020). Oleh karena itu, peran pemerintah sebagai mediator yang empatik menjadi krusial. Pendekatan transformasi konflik yang komprehensif mencakup perubahan personal, relasional, struktural, dan kultural juga diusulkan sebagai strategi resolusi yang konstruktif (Septian, 2022). Mediasi dalam konteks ini merupakan proses manajemen konflik di mana pihak-pihak yang terlibat menyelesaikan perselisihan melalui negosiasi untuk mencapai kesepakatan bersama (Anggraini et al., 2023).

Peran pemerintah sebagai mediator yang empatik menjadi krusial. Pendekatan personal diperlukan untuk menampung aspirasi pedagang, sementara proses yang transparan seperti pembagian kios melalui pengundian bersama dapat meminimalisasi konflik (Steiler, 2023). Sosialisasi berulang dan pelibatan pedagang dalam proses kebijakan juga terbukti penting untuk mencapai efektivitas implementasi (Steiler, 2023). Namun, ketidaktransparanan misalnya dalam

anggaran justru menghambat implementasi karena menimbulkan kecurigaan pedagang terhadap pelaksana kebijakan. Pelaksana kebijakan harus memahami lingkungan sosial, politik, dan ekonomi tempat mereka berusaha mewujudkan kebijakan publik. Oleh karena itu, dalam konteks ini, peran pemerintah daerah tidak boleh hanya berhenti pada posisi sebagai eksekutor kebijakan yang kaku. Pemerintah harus bertindak sebagai mediator yang efektif dan empatik. Mediasi dalam hal ini tidak sekadar duduk bersama untuk melakukan tawar-menawar lapak atau meja kios, melainkan sebuah proses manajemen konflik yang komprehensif.

Manajemen konflik psikologis ini menuntut pemerintah untuk mampu meredam ketakutan, membangun jembatan komunikasi yang transparan, memberikan jaminan keamanan fisik dan aset secara konkret, serta membuktikan bahwa fasilitas di lokasi relokasi benar-benar layak, aman, dan mendukung keberlangsungan bisnis mereka. Tanpa adanya intervensi psikologis untuk memulihkan rasa aman tersebut, resistensi bawah tanah akan terus menjadi duri dalam daging yang mengancam keberlanjutan kebijakan relokasi.

3. Analisis Kritis: Faktor Pendukung dan Penghambat

Keberhasilan implementasi kebijakan relokasi pedagang di Kawasan SGC tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan ditentukan oleh interaksi dinamis antara berbagai variabel pendukung dan faktor penghambat di lapangan. Evaluasi kritis terhadap kedua sisi mata uang ini memberikan gambaran komprehensif mengenai kompleksitas tata kelola perkotaan di tingkat daerah.

a. Faktor Pendukung (Enabling Factors)

Landasan Hukum yang Kuat: Kebijakan ini memiliki legitimasi yuridis yang jelas melalui kewenangan otonomi daerah dalam penataan ruang, penertiban fasilitas umum, serta pengelolaan pasar rakyat. Payung hukum ini memberikan keyakinan bagi aparat birokrasi untuk bertindak secara terstruktur sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Rencana Revitalisasi Infrastruktur yang Komprehensif: Pemerintah daerah tidak hanya memindahkan pedagang, tetapi juga menyertakan paket pembenahan infrastruktur dasar. Normalisasi sistem drainase untuk mencegah banjir, pengaspalan ulang jalan, penataan lampu penerangan, dan perbaikan sanitasi menjadi daya tarik tersendiri yang membuktikan bahwa relokasi ini berorientasi pada perbaikan mutu lingkungan jangka panjang.

Dukungan Penuh Aparat Keamanan: Sinergi yang solid dan terkoordinasi antara unsur TNI, Polri, dan Satpol PP menciptakan iklim keamanan yang kondusif. Kehadiran aparat di lapangan berhasil menekan potensi gesekan fisik, mencegah aksi anarkis, serta menjamin stabilitas keamanan selama proses perpindahan berlangsung.

b. Faktor Penghambat (Barriers and Obstacles)

Kurangnya Kepercayaan Psikologis (*Psychological Distrust*): Faktor psikologis berupa keraguan mendalam dari para pedagang terhadap jaminan keamanan fasilitas di lokasi baru menjadi hambatan terbesar. Trauma masa lalu, kekhawatiran akan sistem kelistrikan yang buruk, dan ancaman keamanan kios di malam hari menciptakan skeptisisme yang sulit dikikis hanya dengan imbauan verbal.

Potensi Konflik Kepentingan dengan Pedagang Existing: Proses relokasi 508 pedagang ke area baru sering kali bersinggungan dengan kepentingan pedagang lama (*existing traders*) yang sudah terlebih dahulu berniaga di sekitar area Pasar Baru. Gesekan ini memicu perebutan ruang ekonomi, kecemburuan sosial terkait alokasi zonasi strategis, dan potensi penolakan dari komunitas lokal yang merasa terganggu kenyamanannya.

Kelayakan Teknis Bangunan dan Risiko Historis: Sebagian bangunan atau area penampungan sementara yang disiapkan sering kali memiliki catatan historis yang kurang baik, seperti riwayat kebakaran di masa lalu atau kondisi fisik bangunan yang kurang memadai untuk aktivitas niaga skala menengah-besar. Hal ini memperkuat resistensi pedagang karena mereka merasa dipindahkan ke tempat yang tidak layak secara teknis maupun keselamatan kerja.

4. Implikasi Teoretis dan Praktis

Temuan dari penelitian dan analisis mendalam mengenai kebijakan relokasi pedagang di Kawasan SGC ini memberikan kontribusi signifikan, baik dalam ranah pengembangan ilmu pengetahuan (teoretis) maupun dalam ranah operasional pemerintahan (praktis).

a. Implikasi Teoretis

Secara teoretis, studi ini memperkaya literatur tentang implementasi kebijakan publik dengan menegaskan bahwa model-model implementasi konvensional yang cenderung teknokratis-top-down sudah tidak lagi memadai jika diterapkan pada isu-isu perkotaan yang melibatkan manusia secara langsung. Penelitian ini mengajukan proposisi bahwa variabel kesejahteraan psikologis (psychological well-being) dan manajemen ketakutan (fear management) harus diintegrasikan secara formal ke dalam kerangka konseptual implementasi kebijakan publik di tingkat daerah. Kegagalan memperhitungkan aspek psikologis dan emosional masyarakat sasaran akan selalu melahirkan resistensi laten, meskipun kebijakan tersebut secara hukum dan administratif sudah dirancang dengan sangat sempurna.

b. Implikasi Praktis

Secara praktis, hasil analisis ini menyiratkan beberapa rekomendasi krusial bagi para pembuat kebijakan di pemerintahan daerah:

- 1) Melampaui Pendekatan Infrastruktur dan Keamanan Fisik: Pemerintah tidak boleh terjebak pada asumsi bahwa penyediaan bangunan fisik dan penjagaan aparat keamanan sudah cukup untuk menyelesaikan masalah penataan pedagang kaki lima. Pembangunan fisik harus berjalan linier dengan pembangunan kepercayaan sosial (social trust).
- 2) Penguatan Fungsi Mediasi Partisipatif: Diperlukan pelembagaan forum dialog dua arah yang inklusif antara pemerintah daerah dan asosiasi pedagang (seperti ASPEC) sejak tahap perencanaan awal, bukan sekadar sosialisasi satu arah di ujung kebijakan. Keterlibatan pedagang dalam perumusan keputusan teknis—seperti penentuan zonasi kios, pengaturan instalasi listrik, dan skema keamanan—akan rasa kepemilikan (sense of belonging) yang tinggi.
- 3) Harmonisasi Kebijakan Penataan Kota dengan Rasa Aman Psikologis: Pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kepekaan tinggi dalam menyeimbangkan target-target administratif (seperti kebersihan kota, kelancaran lalu lintas, dan peningkatan PAD) dengan kebutuhan emosional serta rasa aman para pelaku ekonomi kerakyatan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepemimpinan transformasional Plt Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, merupakan faktor penentu keberhasilan relokasi 508 pedagang pasar tumpah di kawasan Sentra Grosir Cikarang (SGC). Kebijakan relokasi ini berdampak langsung pada penguraian kemacetan di koridor Jalan RE Martadinata dan Jalan Kapten Sumantri. Temuan utama menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan ini tidak hanya bersandar pada mobilisasi fisik dan koordinasi lintas sektor, tetapi sangat bergantung pada fungsi mediasi yang mampu mereduksi beban psikologis pedagang. Mediasi yang inklusif—melalui keterlibatan aktif asosiasi seperti ASPEC—terbukti efektif memitigasi kecemasan kolektif terkait ketidakpastian keamanan aset dan risiko kebakaran di lokasi baru dengan memberikan kepastian hukum serta jaminan perlindungan dari pemerintah.

Kontribusi ilmiah dari penelitian ini terletak pada integrasi dimensi kesejahteraan psikologis sebagai variabel penentu efektivitas kebijakan publik di tingkat daerah. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan model kepemimpinan baru bagi pemerintah daerah dalam menangani konflik sosial-ekonomi melalui pendekatan management of fear (manajemen ketakutan), di mana pemenuhan rasa aman psikologis subjek kebijakan dinilai sama pentingnya dengan penyediaan infrastruktur fisik.

Berdasarkan temuan tersebut, disusun beberapa rekomendasi strategis guna menjamin keberlanjutan kebijakan relokasi jangka panjang. Pertama, Pemerintah Kabupaten Bekasi perlu menginstitusikan fungsi mediasi dan memperkuat komunikasi dua arah dengan asosiasi pedagang guna memitigasi kekhawatiran terkait keamanan aset serta memastikan setiap aspirasi direspon secara cepat dan transparan. Kedua, pemerintah perlu melakukan percepatan pembangunan infrastruktur penunjang di lokasi baru, seperti perbaikan sistem drainase untuk mencegah genangan air, pengaspalan jalan, serta pemasangan lampu penerangan yang memadai demi menciptakan rasa aman dan kenyamanan bagi pedagang maupun pembeli.

Ketiga, evaluasi teknis yang mendalam terhadap kelayakan bangunan lama, seperti eks-Ramayana, harus segera diselesaikan guna menjamin keselamatan kerja, meminimalkan risiko kebakaran, serta menghilangkan trauma psikologis para pedagang. Terakhir, untuk jangka panjang, pemerintah disarankan menerapkan modernisasi tata kelola melalui penerapan konsep desain pasar modern yang estetis dan fungsional—seperti pendekatan Industrial Architecture—guna meningkatkan daya saing pasar tradisional pasca-relokasi agar selaras dengan perkembangan perkotaan Cikarang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Universitas Muhammadiyah Indonesia atas segala dukungan akademis dan fasilitas yang telah diberikan selama proses penelitian ini berlangsung. Rasa terima kasih khusus ditujukan kepada Bapak Asep Surya Atmaja selaku Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi beserta jajaran Pemerintah Kabupaten Bekasi atas keterbukaan informasi serta izin yang diberikan dalam melaksanakan observasi lapangan terkait kebijakan relokasi pasar di kawasan Sentra Grosir Cikarang (SGC).

Apresiasi yang mendalam juga penulis sampaikan kepada Dinas Perhubungan, Satpol PP, serta unsur TNI dan Polri atas bantuan teknis dan wawasan mendalam mengenai koordinasi lintas sektor dalam penataan ruang publik. Kepada rekan sejawat dan para ahli, penulis mengucapkan terima kasih atas masukan kritis serta bantuannya dalam penyuntingan bahasa guna meningkatkan kualitas naskah ini. Seluruh pihak yang tercantum telah memberikan konfirmasi dan izin resmi untuk dicantumkan sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi berharga mereka. Terakhir, penulis menyampaikan apresiasi kepada Jurnal Jiwara atas dukungan finansial yang turut memastikan kelancaran riset ini hingga tuntas.

DAFTAR PUSTAKA

- Amira, A. N., AS, Z. N. S., Alya, E. Z., Alena, F., Fitrie, R. A., & Hadiano, N. K. (2026). Dinamika Konflik antara Pedagang Kaki Lima dan Pemerintah Kota dalam Penataan Kawasan Gembong Surabaya. *Journal Social Society*, 6(3).
- Anggraini, D., Fajri, M., & Islami, S. (2023). Model Resolusi Konflik Pembangunan Jalan Tol Padang- Pekanbaru Trase 4,2 - 36 Km. *Jurnal Niara*, 16(2), 211–221. <https://doi.org/10.31849/niara.v16i2.13694>
- Aser, M. S. (2025). Sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Dinas Perhubungan Dalam Pelaksanaan Penertiban Juru Parkir Liar Di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).
- Astuti, R. F., Miharti, I., Putri, M., Soeroso, Y. H., Riyadi, S., & Bangsa, U. P. (2023). *Innovative Education*.
- Elza, P. (2025). Peran Kepemimpinan Transformasional dalam Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik*, 1(1). Institut Teknologi Sains Bandung. (2021).
- Fitlayeni, R., Putra, I. M., Marleni, M., Elvawati, E., & Putri, W. S. Y. (2021). Penguatan Kapasitas Pedagang dalam Resolusi Konflik Asimetris di Pasar Raya Padang Pasca Gempa. *Jurnal Socius Journal of Sociology Research and Education*, 8(1), 26. <https://doi.org/10.24036/scs.v8i1.216>

- Fitriana, R., Auliya, A. U., & Widiyarta, A. (2020). Analisis Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Kebijakan Deliberatif. *Jurnal Governansi*, 6(2), 93–103. <https://doi.org/10.30997/jgs.v6i2.2863>
- Hidayah, F. N., & Warsono, W. (2023). Resistensi Pedagang Kaki Lima Alun-Alun Bojonegoro Terhadap Kebijakan Relokasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. *Journal of Civics and Moral Studies*, 8(1), 47–55. <https://doi.org/10.26740/jcms.v8n1.p47-55>
- Loe, H. M., Suraji, A., & Cakrawala, M. (2021). Analisis kemacetan lalu lintas pada pasar tumpah jl. Zainal zakse kota Malang. *BOUWPLANK Jurnal Ilmiah Teknik Sipil Dan Lingkungan*, 1(2).
- Lumbantobing, I., Hutahaeen, M., & Tobing, A. L. (2024). Evaluasi Program Revitalisasi Pasar Tradisional Pasar Pagaran Kecamatan Pagaran Kabupaten Tapanuli Utara. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, 11(1).
- Moechtar, O. (2011). Urgensi Ketentuan Zonasi Pasar Tradisional Dengan Pasar Modern Pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 Dalam Aspek Hukum Persaingan Usaha. *Yuridika*, 26(2).
- Nova-Iza, M. (2026). Dinamika Sosial Ekonomi Pedagang Kaki Lima Pasca Relokasi di Sentra PKL Ahmad Dahlan Jombang. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 11(2).
- Rahardjo, H. Agus., Hafizh, N., & Prihanton, M. (2019). Manajemen Resiko Kebakaran untuk Keberlangsungan Fungsi Bangunan. *Prosiding Semnastek*.
- Rozana, R., Karyadi, L. W., & Rosyadi, M. A. (2023). Analisis Perlawanan Pedagang Pasar Tradisional Paokmotong Terhadap Relokasi Pasar Tradisional Paokmotong Kecamatan Masbagik Lombok Timur. *Resiprokal Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 5(1), 1–14. <https://doi.org/10.29303/resiprokal.v5i1.190>
- Rozana, R., Karyadi, L. W., & Rosyadi, M. A. (2023). Analisis Perlawanan Pedagang Pasar Tradisional Paokmotong Terhadap Relokasi Pasar Tradisional Paokmotong Kecamatan Masbagik Lombok Timur. *Resiprokal Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 5(1), 1–14. <https://doi.org/10.29303/resiprokal.v5i1.190>
- Saefulah, I. (2024). Strategi Pengelolaan Pasar Tradisional Jagasatru Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cirebon (Doctoral dissertation, UIN SSC).
- Sastrawan, I. W. W., Darmawan, I. G. S., & Kusuma, I. G. A. G. W. (2024). Penerapan Konsep Comfort of Human Circulation dan Arsitektur Neo Vernakular pada Redesain Pasar Tradisional Desa Sayan. *Jurnal Anala*, 12(2).
- Septian, E. (2022). Transformasi Konflik Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta. *Kolaborasi Jurnal Administrasi Publik*, 8(3), 327–345. <https://doi.org/10.26618/kjap.v8i3.9190>
- Septian, M. R. D., Hermawan, Y., & Pundenswari, P. (2024). Faktor-Faktor Kegagalan Relokasi Pedagang Kaki Lima Gedung Intan Medina Garut. *Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 15(1), 47–56. <https://doi.org/10.36624/jpkp.v15i1.145>
- Steiler, I. (2023). Labour institutions and the dynamic production of informality: collective organisation of hard-to-reach workers in Tanzania. *Global Labour Journal*, 14(3). <https://doi.org/10.15173/glj.v14i3.5330>